KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Keberadaan surpres RUU TPKS jadi tanda tanya
**Tanggal** : Selasa, 22 Februari 2022
**Surat Kabar** : Media Indonesia
**Halaman** : 4

# Keberadaan Surpres RUU TPKS Jadi Tanda Tanya

KEBERADAAN Surat Presiden (Surpres) Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi tanda tanya. Pasalnya, dokumen tersebut tidak dibacakan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang ke-III 2021-2022.

Ketua DPR Puan Maharani beralasan pihaknya belum menerima dokumen tersebut dari pemerintah. Lembaga legislatif itu masih menunggu penyerahan surpres dan daftar inventaris masalah (DIM) RUU TPKS dari pemerintah. Padahal, menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan, surpres dan DIM RUU TPKS sudah diserahkan sepekan sebelum rapat paripurna. "Sudah kita serahkan tanggal 11 Februari. Hari Jumat, dua minggu lalu. Sudah diberikan," kata Andi.

Dia menyebut kedua dokumen itu diserahkan melalui bagian administrasi di Sekretariat Jenderal DPR. Bahkan, pihak Istana Kepresidenan mengantongi tanda terima surpres dan DIM RUU TPKS. "Ada (tanda terima), bahkan saya sudah konfirmasi ke pimpinan DPR," ungkap dia.

Namun, dia enggan menyebut sosok pimpinan DPR yang dimaksud. "Enggak usah disebutlah, ya," sebut dia.

Dia menyampaikan persoalan surpres dan DIM RUU TPKS tidak dibacakan merupakan permasalahan internal DPR. Pemerintah tak ingin ikut campur terhadap permasalahan tersebut. "Yang penting, pemerintah sudah menyelesaikan tugasnya," ujar dia.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya bakal mengonfirmasi keberadaan Surpres RUU TPKS kepada pimpinan DPR sehingga diketahui alasan batalnya pembacaan surpres tersebut. Wakil Ketua Fraksi NasDem itu juga akan mengonsultasikan potensi pembahasan RUU TPKS saat masa reses apakah tetap bisa dilakukan meski Surpres RUU TPKS urung dibacakan dalam rapat paripurna.

Adapun pegangan yang akan dimanfaatkan Willy ialah keputusan Badan Musyawarah pada beberapa waktu lalu. Salah satu kesepakatannya, yaitu Bamus mengizinkan RUU TPKS dibahas saat masa reses seandainya surpres dibacakan dalam rapat paripurna. "Ini sedang kita kaji betul. Jadi, ini memang butuh konsultasi, butuh sebuah *win-win solution* untuk itu," kaya Willy. (Can/Sru/P-1)